



**DINAS PENDIDIKAN  
KAB. LAMONGAN**

**Lamongan**  
Megilan



# **LAPORAN TRIWULAN I PENGELOLAAN RISIKO TAHUN 2024**



**JL. KH. AHMAD DAHLAN NO.  
75 TLP. (0322) 321021  
LAMONGAN - 62211**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga  
melayani  
bangsa**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, kegiatan penyusunan Laporan Triwulan I Pengelolaan Risiko Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan.

Laporan Triwulan I Pengelolaan Risiko merupakan uraian tentang upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Selain itu laporan ini berupaya untuk memberikan informasi bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk melakukan pengelolaan risiko yang sudah teridentifikasi dan melakukan pengendalian agar dapat meminimalisasikan bahkan mencegah terjadinya risiko.

Laporan Triwulan I Pengelolaan Risiko Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ini, tersusun karena dukungan semua pihak, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap agar Laporan Triwulan I Pengelolaan Risiko ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkret bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Lamongan, April 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lamongan



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Ruang Lingkup .....	3
<b>BAB II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO. ..</b>	4
A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Triwulan I .....	4
B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risko Triwulan I.....	8
<b>BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	9
<b>BAB IV MONITORING RISIKO DAN RTP.....</b>	10
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	11
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut dapat menyebabkan kegagalan atau kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Resiko, maka Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya penyimpanan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Dinas pendidikan Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2024 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas pencapaian tujuan organisasi,

penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Control Self Assessment untuk Penilaian Risiko;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE);
8. Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
9. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/193/KEP/413.013/2023 tahun 2023 tentang Struktur Pengelolaan Resiko Kabupaten Lamongan.

## C. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Rencana Pengelolaan Resiko dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

### 2. Tujuan

Pengelolaan Resiko bertujuan untuk (1) memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, (2) mewujudkan budaya pengendalian intern, (3) mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP, (4) memberikan rencana pemecahan masalah

## D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyelenggaraan SPIP ini meliputi pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan risiko kegiatan (operasional) OPD.

## **BAB II**

### **RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**

#### **A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Pendidikan Triwulan I**

##### **1. Identifikasi Risiko**

Pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Kepala Bappelitbangda, atau OPD yang menangani perencanaan selaku koordinator teknis.

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertian dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Sedangkan pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renjadan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan dibantu oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3, Eselon 4 dan Sub Koordinator.

Hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko) diperoleh hasil sebagai berikut ***pada lampiran I dan Lampiran II.***

## 2. Hasil Analisis Risiko dan Eavaluasi Risiko

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah (Stakeholders) mengenai aspek-aspek pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi:

1. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal.
2. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi.
3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Kemudian dilakukan penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah (Stakeholders) mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi (tolerable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

Rumusan kriteria tersebut, ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Setelah itu, dilakukan penilaian risiko terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko, kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko dandakala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk).

Dalam penyusunan RTP ini tim menggunakan skala dampak dalam skala 5, contoh kategori dampak risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**Tabel**  
**Kategori Dampak Risiko Skala 5**

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak resiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputase	Hukum
Sangat tinggi	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas dibanyak media masa	Pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	Kegaitan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/local	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Moderat	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efisiensi	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terhambat, kurang efisiensi	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi teguran
Tidak signifikan	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negative, namun tidak material	Tidak Material

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Untuk skala probabilitas, tim penyusun menggunakan kriteria penilaian skala 5, dengan ilustrasi sebagai berikut :

**Tabel**  
**Tabel Tingkat Kemungkinan/Probabilitas**

Level Kemungkinan	Skor	Kriteria Kemungkinan		
		Persentase dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
<b>Hampir tidak terjadi</b>	<b>1</b>	0% < x ≤ 5%	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
<b>Jarang terjadi</b>	<b>2</b>	5% < x ≤ 10%	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
<b>Kadang terjadi</b>	<b>3</b>	10% < x ≤ 20%	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
<b>Sering terjadi</b>	<b>4</b>	20% < x ≤ 50%	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
<b>Hampir pasti terjadi</b>	<b>5</b>	50% < x < 100%	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk). Dalam menentukan skala risiko penulis menggunakan nilai skala 5 dengan ilustrasi sebagai berikut :

**Tabel  
Kriteria Penerima Risiko**

Skala Nilai Risiko	Kategori	Penerimaan Risiko	Tindakan
1,00 – 2,00	Sangat Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
2,01-4,00	Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
4,01 – 9,00	Sedang	Diperlukan pengendalian yang lebih baik	disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya
9,01 – 12,00	Tinggi	Harus menjadi Perhatian manajemen	diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
12,01 – 25,00	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima	diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko

Penentuan risiko prioritas dan acceptable/unacceptable risk, digunakan matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/risk appetite yang telah ditentukan. Matriks risiko dapat dibuat skala 5, dengan ilustrasi sebagai berikut :

**Diagram  
Penilaian Risiko Prioritas**

MATRIKS ANALISIS RESIKO		Dampak Konsekuensi				
		1	2	3	4	5
		Tdk. Signifikan	Kecil	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti				
	4	Kemungkinan Besar				
	3	Mungkin				
	2	Jarang				
	1	Sangat Jarang				
Keterangan		Sangat Rendah (1)	Rendah (2)	Sedang (3)	Tinggi (4)	Sangat tinggi (5)

Hasil Analisis Resiko dapat di lihat pada **Lampiran IV**

**B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Pendidikan Triwulan I**

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan I sebanyak 6 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat di lihat pada **lampiran VI**
2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan I sebanyak 6 atau 100% dari 6 kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada **lampiran VIII**
3. Jika terjadi terdapat pengendalian di triwulan 1 yang belum terlaksana akan dilakukan pada tribulan berikutnya.

### **BAB III**

### **HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Manajemen Risiko focus kepada tindak pengendalian atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah tentu akan menemukan hambatan yang apabila tidak diupayakan pemecahannya akan berdampak buruk pada pencapaian kinerja Organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kab. Lamongan terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi sebagai berikut

1. Masih belum tercapai rencana tindak pengendalian (RTP) yang telah ditetapkan;
2. Minimnya pengetahuan pegawai tentang risiko kegiatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi;
3. Dalam penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan masih terkendala dengan laporan kegiatan yang dilaksanakan.

## **BAB IV**

### **MONITORING RISIKO DAN RTP**

Pemantauan dan evaluasi atas rencana tindaklanjut pengendalian pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian risiko yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

#### 1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing Bidang sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan.

#### 2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar sebagai evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan dengan lancar.

#### 3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, Pemerintah harus melaksanakan tindak lanjutnya.

#### 4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan memberikan laporan atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sesuai tanggung jawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan .

Pengendalian yang telah dirancang Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Tahun 2024 tidak teridentifikasi kejadian risiko (risk event) baik risiko strategis maupun risiko operasional. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pengendalian risiko sudah sesuai dengan Rencana Tindak Pengendalian yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan . Sebagaimana pada ***Lampiran VIII***

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I dapat simpulan bahwa Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapat perhatian secara khusus terhadap dampak yang akan terjadi dikemudian hari, dan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan time management atau pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga target keberhasilan kegiatan dapat diraih.

Analisis manajemen risiko harus dilakukan dalam semua Program kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, hal ini dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap Program kegiatan, sehingga dari resiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan, sehingga semua Program kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dapat berjalan dengan lancar.

Rencana Tindak Pengendalian Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, dan pelayanan terhadap masyarakat. Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar penilaian atas pencapaian tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan .

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**  
**LAPORAN TRIWULAN I PENGELOLAAN RISIKO**  
**DINAS PENDIDIKAN KAB. LAMONGAN**  
**TAHUN 2024**

**Kertas Kerja Strategis OPD**  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Dinas Pendidikan
Tahun Penilaian	2024
Periode yang Dinilai	2024
Tujuan Strategis	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
OPD yang dinilai	Dinas Pendidikan
Tujuan Strategis Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjamina kualitas dan aksesibilitas Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan</li> <li>2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>3. Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan</li> </ol>

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.24.01.25.01	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan</li> <li>2. Banyak yang sudah berkeluarga</li> </ol>	Eksternal	C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya angka rata-rata lama sekolah</li> <li>2. Berpotensi bertambahnya angka kemiskinan</li> </ol>	Intansi, Pemda dan Masyarakat
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Pendidikan yang tidak terjangkau oleh</li> </ol>	Internal	C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka Harapan Lama Sekolah Menurun sehingga tidak mencapai target</li> </ol>	Intansi, Pemda dan Masyarakat

					<p>keluarga miskin</p> <p>2. Masih adanya Bullying atau tindak kekerasan di sekolah</p> <p>3. kurangnya kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan</p>			<p>yang telah di tetapkan</p> <p>2. Banyak Pekerja Anak Di bawah umur</p> <p>3. Berdampak pada naiknya angka kemiskinan</p>	
3	Prosentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Pendidik	RSO.24.01.25.3	Kepala Dinas pendidikan	<p>1. Guru belum memenuhi kualifikasi S1/D4 linier</p> <p>2. Belum terdaftar pada Dapodik</p>	Internal	C	<p>1. Kesejahteraan guru belum meningkat</p> <p>2. Kualitas guru masih rendah</p> <p>3. Kualitas pendidikan tidak merata dan mengalami penurunan</p>	Intansi, Pemda, guru, dan Masyarakat
4	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RSO.24.01.25.4	Kepala Dinas pendidikan	<p>1. SDM yang tidak berkompeten</p> <p>2. Integritas dan etika yang rendah</p>	Internal	C	<p>1. Tidak bisa tercapai pelayanan secara maksimal</p> <p>2. Akuntabilitas Kinerja tidak bisa tercapai dengan baik</p>	Intansi, Pemda dan Masyarakat

**Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda**  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda			Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Nama OPD			Dinas Pendidikan								
Tahun Penilaian			2024								
Periode yang Dinilai			2024								
Tujuan Strategis			Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan								
Sasaran strategis OPD			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjaminnya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan</li> <li>2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>3. Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan</li> </ol>								
Urusan Pemerintahan			Pendidikan								
OPD yang Dinilai			Dinas Pendidikan								
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/ UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumb e		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD,SD, SMP dan Kesetaraan yang terakreditasi B	Perencanaan	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan Satuan Pendidikan yang belum Akreditasi	ROO.24.01.25.1	Kepala Dinas, Kabid Bidang dan Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Pendidikan belum mengirimkan data akreditasi</li> <li>2. adanya Satuan Pendidikan yang baru berdiri</li> </ol>	Internal	C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlambat dalam Pengumpulan data Sekolah yang belum akreditasi</li> <li>2. Tidak masuk dalam prioritas penilaian oleh BAN</li> <li>3. Satuan Pendidikan telat untuk penilaian akreditasi</li> </ol>	Intansi, Pemda dan satuan pendidikan

2	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan yang terakreditasi B	Pelaksanaan	Adanya Satuan Pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	1. Sarana dan Prasarana satuan pendidikan yang belum memadai 2. Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan yang belum standar 3. Pembelajaran yang belum sesuai dengan kurikulum yang berlaku	Internal	C	1. Satuan Pendidikan tidak lolos penilaian akreditasi 2. Nilai Akreditasi yang belum naik minimal B	Disdik, Pemda dan satuan Pendidikan
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan dan Rehabilitasi sarana prasarana dan utilitis sekolah sesuai standar	Perencanaan/pendataan	Pendataan satuan Pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP dan PNF	Satuan pendidikan belum melakukan pemutakhiran data sarpras di aplikasi DAPODIK	Internal	C	1. Data terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan 2. salah sasaran pemberian bantuan	Intansi, Pemda dan satuan pendidikan
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Peserta Didik Jenjang SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK/M A dan Perguruan Tinggi yang berhak menerima Biaya	Pelaksanaan	Masih terdapat Peserta didik dari keluarga miskin yang tidak menerima beasiswa	ROO.24.01.25.4	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	Tidak Terdata dalam pengajuan beasiswa	Internal	C	1. Meningkatnya angka putus sekolah 2. Pengetasan kemiskinan terhambat	Dinas Pendidikan, Pemda dan Masyarakat

		Personil Peserta Didik (Beasiswa Perintis)									
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Ketercukupan Pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	Perencanaan	Pengajuan Formasi ASN tidak sesuai dengan Analisis Kebutuhan	ROO.24.01.25.5	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	1. Adanya kesalahan dalam penghitungan analis kebutuhan 2. Satuan pendidikan terlambat mengirimkan data analis kebutuhan ke dinas pendidikan	Internal	C	1. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan tidak merata 2. adanya Kesenjangan kualitas pendidikan	Instansi, Pemda dan Masyarakat
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Perencanaan	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	Banyak guru yang tidak memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan	Internal	C	Guru/tenga Pendidik	Guru/Te
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS/BOP yang sesuai dengan	Perencanaan	Terdapat satuan Pendidikan yang tidak menerima	ROO.24.01.25.7	Kepala Dinas pendidikan, Sekretari	Satuan Pendidikan tidak melakukan penginputan data sekolah yang	Internal	C	1. Sataun pendidikan tidak menerima dana BOS dan BOP	Pendidikan

		aturan dan JUKNIS yang berlaku		SK. Penerima BOS/BOP		s Dinas	benar pada Aplikasi DAPODIK			2. Terhambatnya Proses Pembelajaran karena terbenturnya anggaran	
8	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS/BOP yang sesuai dengan aturan dan JUKNIS yang berlaku	Pelaksanaan	Adanya satuan pendidikan yang belum memahami JUKNIS BOS/BOP secara benar	ROO.24.01.25.8	Kepala Dinas pendidikan dan Sekretaris Dinas	Keterbatasan tenaga SDM Bendahara terutama untuk PAUD dan SD	Internal	C	Banyak Laoran Yang tidak sesuai dengan JUKNIS	Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan
9	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS/BOP yang sesuai dengan aturan dan JUKNIS yang berlaku	Pelaporan	Satuan Pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah ditetapkan	ROO.24.01.25.9	Kepala Dinas pendidikan dan Sekretaris Dinas	1. Banyak Bendahara BOS/BOP yang belum mengerti aplikasi ARKAS 2. Sering Bergantinya dan Update Aplikasi ARKAS sehingga menyulitkan bendahara untuk memahaminya	Internal	C	Terlambat dalam menyampaikan laporan akan berdampak pada pemotongan dana BOS/BOP	Dinas Pendidikan dan satuan Pendidikan
10	Program Pengelolaan Pendidikan	Terlaksanya pelatihan penggunaan aplikasi di	Pelaksanaan	Banyak Peserta Pelatihan Aplikasi	ROO.24.01.25.10	Kepala Dinas pendidikan dan	1. Instruktur yang kurang kompeten 2. Peserta	Internal	C	1. Kompetensi Peserta pelatihan	Dinas Pendidikan, dan Satuan

		bidang pendidikan dengan baik		yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber		Kabid GTK	Pelatihan tidak menguasai IT			yang tidak meningka t 2. Harapan adanya pelatihan tidak tercapai secara maksimal	Pendidik an
11	Program Pengelolaan Pendidikan	Terbentuknya Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Pelaksana an	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik tidak dapat terbentuk	ROO.24.01.25.11	Kepala Dinas pendidik an dan Kabid	1. Tidak adanya fasilitas dari Dinas Pendidikan 2. Kurang adanya Koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Ketua Forum/Komunitas	Intern al	C	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kurang berkembang	Dinas Pendidik an, satuan pendidik an dan Tenaga pendidik dan kependi dikan
12	Program Pengelolaan Pendidikan	Terlaksana nya kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pelaksana an	Masih adanya tindakan perundungan, dan kekerasan/Bullying pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.12	Kepala Dinas pendidik an dan KABID SD,SMP dan PNF	1. Adanya persepsi yang berbeda tentang bullying oleh civitas sekolah 2. Tata Kelolah sekolah yang masih perlu perbaikan terutama yang berhubungan dengan tindak perundungan	Intern al	C	Terjadinya tindak Perundungan dan kekerasan pada satuan pendidikan	Dinas Pendidik an, Satuan Pendidik an dan Peserta Didik

							dan kekerasan				
13	Program Pengelolaan Pendidikan	Perlengkapan Peserta Didik Tersedia Sesuai dengan Standar	Pendataan	Tidak Tersampainya Informasi ke Satuan Pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.13	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP PNF	Satuan Pendidik tidak Menrima Surat Undangan Sosialisasi	Internal	C	Adanya peserta didik dari satuan pendidikan yang tidak menerima perlengkapan siswa	Dinas Pendidikan dan peserta Didik yang berhak menerima
14	Program Pengelolaan Pendidikan	Perlengkapan Peserta Didik Tersedia sesuai dengan Standar	Pelaksanaan	Perlengkapan Peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.14	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP , PNF	Pengadaan barang tidak dilakukan secara transparan	Internal	C	Kualitas barang yang diterima oleh peserta didik berkualitas rendah	Dinas Pendidikan dan Peserta Didik
15	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan dan Rehabilitasi sarana prasarana dan utilitis sekolah sesuai standar	Pelaksanaan	Penyelesaian Pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.15	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP ,PNF	1. Kendala cuaca yang tidak menentu 2. Pencairan dana yang terlambat	Eksternal	C	Pembangunan tidak selesai tepat waktu	Disdik, Kontraktor dan satuan pendidikan

**Formulir Kertas Kerja**  
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian 2024

Nama OPD Dinas Pendidikan

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan</b>							
1	Dinas Pendidikan	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RS0.24.01.25.01	10	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan</li> <li>2. Banyak yang sudah berkeluarga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya angka rata-rata lama sekolah</li> <li>2. Berpotensi bertambahnya angka kemiskinan</li> </ol>
2	Dinas Pendidikan	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RS0.24.01.25.2	9	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Pendidikan yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin</li> <li>2. Masih adanya Bullying atau tindak kekerasan di sekolah</li> <li>3. Kurangnya kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka Harapan Lama Sekolah Menurun sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan</li> <li>2. Banyak Pekerja Anak Di bawah umur</li> <li>3. Berdampak pada naiknya angka kemiskinan</li> </ol>
3	Dinas Pendidikan	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Pendidik	RS0.24.01.25.3	11	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru belum memenuhi kualifikasi S1/D4 linier</li> <li>2. Belum terdaftar pada Dapodik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesejahteraan guru belum meningkat</li> <li>2. Kualitas guru masih rendah</li> <li>3. Kualitas pendidikan tidak merata dan mengalami penurunan</li> </ol>
4	Dinas Pendidikan	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RS0.24.01.25.4	5	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang tidak berkompeten</li> <li>2. Integritas dan etika yang rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak bisa tercapai pelayanan secara maksimal</li> <li>2. Akuntabilitas Kinerja tidak bisa tercapai dengan baik</li> </ol>

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
<b>Risiko Operasional OPD</b>							
1	Dinas Pendidikan	Adanya keterlambatan pendaftaran pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan Satuan Pendidikan yang belum Akreditasi	ROO.24.01.25.1	9	Kepala Dinas, Kabid Bidang dan Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Pendidikan belum mengirimkan data akreditasi</li> <li>2. Adanya Satuan Pendidikan yang baru berdiri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlambat dalam Pengumpulan data Sekolah yang belum akreditasi</li> <li>2. Tidak masuk dalam prioritas penilaian oleh BAN</li> <li>3. Satuan Pendidikan telat untuk penilaian akreditasi</li> </ol>
2	Dinas Pendidikan	Adanya Satuan Pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	8	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan Prasarana satuan pendidikan yang belum memadai</li> <li>2. Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan yang belum standar</li> <li>3. Pembelajaran yang belum sesuai dengan kurikulum yang berlaku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Pendidikan tidak lolos penilaian akreditasi</li> <li>2. Nilai Akreditasi yang belum naik minimal B</li> </ol>
3	Dinas Pendidikan	Pendaftaran satuan Pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3	6	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP dan PNF	Satuan pendidikan belum melakukan pemutakhiran data sarpras di aplikasi DAPODIK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan</li> <li>2. salah sasaran pemberian bantuan</li> </ol>
4	Dinas Pendidikan	Masih terdapat Peserta didik dari keluarga miskin yang tidak menerima beasiswa	ROO.24.01.25.4	11	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	Tidak Terdata dalam pengajuan beasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya angka putus sekolah</li> <li>2. Pengetasan kemiskinan terhambat</li> </ol>
5	Dinas Pendidikan	Pengajuan Formasi ASN tidak sesuai dengan Analisis Kebutuhan	ROO.24.01.25.5	9	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesalahan dalam penghitungan analisis kebutuhan</li> <li>2. Satuan pendidikan terlambat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan tidak merata</li> <li>2. adanya Kesenjangan</li> </ol>

						mengirimkan data analis kebutuhan ke dinas pendidikan	kualitas pendidikan
6	Dinas Pendidikan	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	7	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	Banyak guru yang tidak memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan	Guru tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut
7	Dinas Pendidikan	Terdapat satuan Pendidikan yang tidak menerima SK. Penerima BOS/BOP	ROO.24.01.25.7	8	Kepala Dinas pendidikan, Sekretaris Dinas	Satuan Pendidikan tidak melakukan penginputan data sekolah yang benar pada Aplikasi DAPODIK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sataun pendidikan tidak menerima dana BOS dan BOP</li> <li>2. Terhambatnya Proses Pembelajaran karena terbenturnya anggaran</li> </ol>
8	Dinas Pendidikan	Adanya satuan pendidikan yang belum memahami JUKNIS BOS/BOP secara benar	ROO.24.01.25.8	9	Kepala Dinas pendidikan dan Sekretaris Dinas	Keterbatasan tenaga SDM Bendahara terutama untuk PAUD dan SD	Banyak Laoran Yang tidak sesuai dengan JUKNIS
9	Dinas Pendidikan	Satuan Pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah ditetapkan	ROO.24.01.25.9	12	Kepala Dinas pendidikan dan Sekretaris Dinas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak Bendahara BOS/BOP yang belum mengerti aplikasi ARKAS</li> <li>2. Sering Bergantinya dan Update Aplikasi ARKAS sehingga menyulitkan bendahara untuk memahaminya</li> </ol>	Terlambat dalam menyampaikan laporan akan berdampak pada pemotongan dana BOS/BOP
10	Dinas Pendidikan	Banyak Peserta Pelatihan Aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	ROO.24.01.25.10	8	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instruktur yang kurang kompeten</li> <li>2. Peserta Pelatihan tidak menguasai IT</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Peserta pelatihan yang tidak meningkat</li> <li>2. Harapan adanya pelatihan tidak tercapai secara maksimal</li> </ol>
11	Dinas Pendidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik tidak dapat	ROO.24.01.25.11	6	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya fasilitas dari Dinas Pendidikan</li> <li>2. Kurang adanya Koordinasi</li> </ol>	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kurang berkembang

		terbentuk				antara Dinas Pendidikan dengan Ketua Forum/Komunitas	
12	Dinas Pendidikan	Masih adanya tindakan perundungan, dan kekerasan/Bullying pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.12	10	Kepala Dinas pendidikan dan KABID SD,SMP dan PNF	3. Adanya persepsi yang berbeda tentang bullying oleh civitas sekolah 4. Tata Kelolah sekolah yang masih perlu perbaikan terutama yang berhubungan dengan tindak perundungan dan kekerasan	Terjadinya tindak Perundungan dan kekerasan pada satuan pendidikan
13	Dinas Pendidikan	Tidak Tersampainya Informasi ke Satuan Pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.13	9	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP PNF	Satuan Pendidik tidak Menrima Suarat Undangan Sosialisasi	Adanya peserta didik dari satuan pendidikan yang tidak menerima perlengkapan siswa
14	Dinas Pendidikan	Perlengkapan Peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.14	6	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP, PNF	Pengadaan barang tidak dilakukan secara transparan	Kualitas barang yang diterima oleh peerta didik berkualitas rendah
15	Dinas Pendidikan	Penyelesaian Pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.15	9	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP,PNF	1. Kendala cuaca yang tidak menentu 2. Pencairan dana yang terlambat	Pembangunan tidak selesai tepat waktu

**Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan  
Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
1	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik ditindaklanjuti masih belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku	Pimpinan melakukan tindak lanjut atas pelanggaran perilaku/kode etik dengan sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku secara adil tidak ada pengecualian	Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris	2024
2	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi tetapi belum dilakukan secara berkala.	-Mengadakan Bimtek/pelatihan pengelolaan resiko pada pegawai dilakukan secara berkala dan tepat sasaran	Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris	2024
3	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan tapi belum terlaksana secara konsisten	Pimpinan secara konsisten menerapkan pengelolaan resiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengembalian keputusan	Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris	2024
4	Tidak Semua pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap tetapi masih ada pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	Pengajuan Formasi ASN Sesuai kebutuhan di utamakan pegawai PTT Dinas pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris	2024
5	Maih ada kriteria penyelegasian wewenang ditentukan belum secara tepat	Pimpinan mengkomunikasikan wewenang dan tanggung jawab dengan jelas dan dipahami oleh pegawai,kemudian direviu dan dimutakhirkan secara berkala	Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris	2024
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, tetapi belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Pimpinan membuat analisis dan evaluasi kinerja pegawai untuk di usulkan ke BKPSDM sebagai bahan pertimbangan untuk perhitungan penghasilan	Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris	2024
7	APIP belum memahami sepenuhnya bagaimana dalam melaksanakan pengawasan berbasis risiko	APIP setiap melaksanakan pengawasan dilakukan dengan berbasis resiko yang harus dipahami oleh setiap petugas	Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris	2024
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun hanya saja perlu adanya mekanisme tindak lanjut temuan	Setiap temuan yang ada dilakukan tindak lanjut sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku	Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris	2024

**Formulir Kertas Kerja**  
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
Dinas Terkait	Dinas Pendidikan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:</b>							
1	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RS0.24.01.25.01	Pendataan masyarakat yang putus sekolah atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal	Banyaknya penduduk Lamongan yang bekerja di luar kabupaten Lamongan	Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait terutama pemerintaan desa setempat dalam melaksanakan pendataan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid PNF	Semester 1 (Jan s/d Juni 2024)
2	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	1. Memberikan Beasiswa PERINTIS Untuk peserta didik dari keluarga Miskin dari jenjang SD sampai Perguruan Tinggi 2. Melakukan sosialisasi pada Guru akan	Keterbatasan Anggaran sehingga masih ada peserta didik yang memenuhi syarat tapi belum mendapatkan beasiswa	1. Memprioritaskan dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Pendidikan	Tribulan 4 (Okt sd Des 2024)

			pentingnya sertifikat pendidik		beasiswa		
3	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Pendidik	RSO.24.01.25.3	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan program beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4</li> <li>Melakukan sosialisasi pada Guru akan pentingnya sertifikat pendidik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>kurang minatnya guru untuk melanjutkan pendidikan ke S1/D4</li> <li>Masih banyak guru yang belum masuk di aplikasi Dapodik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik</li> <li>Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik</li> </ol>	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Jan sd Des 2024
4	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RSO.24.01.25.4	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perbup No. 29 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Linkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan</li> <li>Program Pelatihan dan BIMTEK SAKIP</li> </ol>	masih terdapat Kualitas SDM yang belum memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP</li> <li>Melaksanakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai</li> </ol>	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas	Tribulan II (April sd Jun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:</b>							
1	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan Satuan Pendidikan yang belum Akreditasi	ROO.24.01.25.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Input dan Sinkronisasi Data secara berkala pada Aplikasi Dapodik oleh satuan pendidikan</li> <li>2. Membuat Jadwal jadwal satuan pendidikan yang memenuhi syarat untuk di ajukan penilaian akreditasi.</li> </ol>	Satuan pendidikan tidak melakukan updating data pada aplikasi dapodik	Dinas pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP dan PNF	Tribulan 1 (Jan sd Mart 2024)
2	Adanya Satuan Pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	Satuan Pendidikan melakukan persiapan semua dokumen sesuai dengan instrumen akreditasi	Banyak dokumen yang di minta pada instrumen akreditasi di mengerti oleh satuan pendidikan	Sosialisasi dan pendampingan terhadap satuan pendidikan yang akan dinilai oleh BAN -SM	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP dan PNF	Tribulan 3 ( Juli sd Sep 2024)
3	Pendataan satuan Pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3	Input data dan sinkronisasi pada aplikasi dapodik secara berkala	Data sarpras pada dapodik banayk yang tidak diupdate sesuai kondisi	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan CEK kondisi sarpras langsung ke lokasi	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP dan PNF	Tribulan 1 ( Jan sd Maret 2024)
4	Masih terdapat Peserta didik dari keluarga miskin yang tidak menerima beasiswa	ROO.24.01.25.4	Melakukan prioritas pada Peserta didik yang belum mendapat bantuan dari yang lainnya	Data diterima sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Sosialisasi</li> <li>2. Pengajuan pemabahan Anggaran Beasiswa</li> </ol>	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas	Tribulan 2 (April sd Jun 2024)
5	Pengajuan Formasi ASN tidak sesuai dengan Analisis Kebutuhan	ROO.24.01.25.5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ANJAB Dinas Pendidikan</li> <li>2. Data Analisis</li> </ol>	Adanya perbedaan data Dapodik dengan	Melakukan perbaik data pada Dapodik dan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Tribulan I ( Jan sd Maret 2024)

			Kebutuhan oleh satuan pendidikan	Data Analisis Kebutuhan	data analisi kebutuhan oleh satuan pendidikan		
6	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	2. Sosialisasi Tentang PAK 3. Input data di Aplikasi PMM	adanya sebagian guru yang belum memnafaatkan Aplikasi PMM	Dinas Pendidikan Melakukan Sosialisasi dan BIMTEK cara penggerjaan Ekinerja di PMM	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Tribulan I ( Jan sd Maret 2024)
7	Terdapat satuan Pendidikan yang tidak menerima SK. Penerima BOS/BOP	ROO.24.01.25.7	1. Semua Satuan Pendidikan Sudah Terupdate di DAPODIK 2. Semua data di DAPODIK Valid	Masih ada satuan pendidikan yang terlambat sinkronisasi data melebihi Cut Off	Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan pada satuan pendidikan untuk Penggerjaan Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan dan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Januari dan Juli 2024
8	Adanya satuan pendidikan yang belum memahami JUKNIS BOS/BOP secara benar	ROO.24.01.25.8	1. Semua Satuan Pendidikan Memiliki Juknis BOS/BOP 2. Di berikan layanan BOS/BOP secara daring dan luring	Adanya persepsi yang berbeda-beda oleh satuan pendidikan mengenai apa yang ada pada Juknis BOS/BOP	Melakukan BIMTEK dan Sosialisasi ke satuan Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris	April - Mei 2024
9	Satuan Pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah di tetapkan	ROO.24.01.25.9	Selalu Mengingatkan kepada Satuan Pendidikan	Adanya satuan pendidikan yang aplikasi ARKASnya mengalami kendala	1. Melakukan BIMTEK ARKAS 2. Layanan ARKAS secara daring/Luring	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris	Jan - Des 2024
10	Banyak Peserta Pelatihan Aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	ROO.24.01.25.10	1. Pemberian waktu untuk tanya jawab 2. Narasumber yang menguasai materi	Nasih ada peserta pelatihan yang tidak menguasai teknologi informasi	Melalui peltihan dan BIMTEK semua guru menguasai IT	Kepala Bidang GTK	Juli - Agt 2024
11	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik tidak	ROO.24.01.25.11	Adanya Forum pendidik dan Tenaga	Belum adanya Koordinasi	Dinas Pendidikan Melakukan	Kepala Dinas Pendidikan dan	Juli 2024

	dapat terbentuk		kependidikan secara mandiri	antara Dinas Pendidikan dengan Koordinator komunitas	koordinasi dan memfasilitasi pembentukan komunitas belajar	Kabid	
12	Masih adanya tindakan perundungan, dan kekerasan/Bullying pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.1 2	1. Membuat Inovasi BU EWIS 2. Membentuk TPPK	Adanya perbedaan persepsi tentang Bullying/tindak kekerasan pada satuan pendidikan	melakukan Sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid	Jan - Des 2024
13	Tidak Tersampainya Informasi ke Satuan Pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.1 3	Surat Undangan Sosialisasi ke satuan pendidikan	Adanya Satuan pendidikan yang terlambat menerima informasi	Menyampaikan informasi lewat surat, Website dan Medsoc	Kepala Dinas dan Kabid	Mei - Juli 2024
14	Perlengkapan Peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.1 4	Pengadaan barang sesuai dengan juknis yang berlaku	masih adanya barang yang tidak sesuai dengan standar	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	Kepala Dinas dan Kabid	Juki - Agts 2024
15	Penyelesaian Pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.1 5	Melaksanakan pekerjaan lebih awal ketika sudah keluar surat perintah untuk mengerjakan	Tidak segera melaksanakan pekerjaan meskipun sudah ada surat perintah melaksanakan pekerjaan	Melaksanakan Pekerjaan Sesuai dengan Juknis yang berlaku	Kepala Dinas dan Kabid	Jun - Des 2024

**Formulir Kertas Kerja**  
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian	2024					
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing					
Urusan Pemerintahan	Pendidikan					
Dinas Terkait	Dinas Pendidikan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:</b>						
1	Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait terutama pemerintahan desa setempat dalam melaksanakan pendataan	Surat Undangan Nota Dinas Rapat Koordinasi	Dinas Pendidikan	Instansi dan Pemerintahan Desa Terkait	Jan s/d Juni 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
2	1. Memprioritaskan dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk beasiswa	Surat Undangan Sosial Media Surat Pengajuan Penambahan Anggaran	Dinas Pendidikan(Sekretariat Disdik)	Instansi Terkait, Satuan Pendidikan, Peserta didik dan Mahasiswa	Juli sd Sep 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
3	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada	Surat Undangan Rapat Sosialisasi Lurung/Daring	Dinas Pendidikan (Bidang GTK) dan Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan dan Guru	Jan - Maret 2024	dilaksanakan secara berkala

	aplikasi Dapodik					
4	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksanakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai	Surat Undangan Rapat Koordinasi Luring/Daring	Dinas Pendidikan/Sekretariat	Pegawai Dinas Pendidikan	Juli - Sep 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:</b>						
1	Dinas pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	Surat Undangan Nota Dinas Luring/daring Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP dan PNF	satuan Pendidikan	Tribulan II (April sd Juni)	dilaksanakan pada waktu tertentu
2	Sosialisasi dan pendampingan terhadap satuan pendidikan yang akan dinilai oleh BAN -SM	Surat Undangan Nota Dinas Luring/daring Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP dan PNF	satuan Pendidikan	Tribulan III (Juli sd Sep 2024)	dilaksanakan pada waktu tertentu
3	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan CEK kondisi sarpras langsung ke lokasi	Surat Pemberitahuan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP dan PN	satuan Pendidikan	Tribulan I (Jan sd Maret 2024)	dilaksanakan pada waktu tertentu
4	1. Melakukan Sosialisasi 2. Pengajuan penambahan Anggaran Beasiswa	Surat Undangan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Sekretariat	Peserta didik/mahasiswa/masyarakat	Tribulan III (Juli sd Sep 2024)	dilaksanakan pada waktu tertentu
5	Melakukan perbaikan data pada Dapodik dan data analisis kebutuhan oleh satuan pendidikan	Surat Pemberitahuan Sosial Media Luring/daring	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Guru dan Operator Dapodik	Tribulan I (Jan sd Maret 2024)	dilaksanakan secara berkala
6	Dinas Pendidikan Melakukan Sosialisasi dan BIMTEK cara penggerjaan Ekinerja di PMM	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Satuan Pendidikan, Pendidik dan tenaga kependidikan	Tribulan I (Jan sd Maret 2024)	dilaksanakan pada waktu tertentu
7	Melakukan Sosialisasi	Surat Undangan	Dinas Pendidikan/Sub bag	Satuan	Januari -	dilaksanakan

	dan Pendampingan pada satuan pendidikan untuk Pengerjaan Dapodik	Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Prencanaan	Pendidikan/OPS	Agustus 2024	pada waktu tertentu
8	Melakukan BIMTEK dan Sosialisasi ke satuan Pendidikan	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Sub bag Prencanaan	Satuan Pendidikan/Bendahara BOS/BOP	Januari - Agustus 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
9	1. Melakukan BIMTEK ARKAS 2. Layanan ARKAS secara daring/Luring	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Sekretaris Dinas	Satuan Pendidikan/Bendahara BOS/BOP	April - Mei 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
10	Melalui peltihan dan BIMTEK semua guru menguasai IT	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Satuan Pendidikan dan tenaga Pendidik	Juli - Agt 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
11	Dinas Pendidikan Melakukan koordinasi dan mefasilitasi pembentukan komunitas belajar	Surat Undangan Rapat Koordinasi Sosial Media	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Agustus - Okt 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
12	melakukan Sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	Surat Undangan Sosialisasi dan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan Pendidikan dan Peserta didik	Mei - Juli 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
13	Menyampaikan informasi lewat surat, Website dan Medsoc	Surat Undangan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan Pendidikan dan Peserta didik	April - Juni 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
14	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	Surat Undangan Website Media Sosial	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Masyarakat/Publik	April - Agustus 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
15	Melaksanakan Pekerjaan Susuai dengan Juknis yang berlaku	Juknis Surat Media Sosial	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan Pendidikan dan kontraktor	Mei - Des 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu

**Formulir Kertas Kerja**  
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian 2024

Tujuan Strategis Pemda Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing

Urusan Pemerintahan Pendidikan

Dinas Terkait Dinas Pendidikan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:</b>						
1	Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait terutama pemerintaan desa setempat dalam melaksanakan pendataan	1. Nota Dinas 2. Mou Kesepakatan kerjasama dengan instansi lain 3. Monitoring Kegiatan	Kabid PNF	Tribulan 1 (Jan – Mar) tahun 2024	Feb 2024	Dilakukan secara berkala
2	1. Memprioritaskan dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk beasiswa	1. MONEV 2. Supervisi	Sekretaria Dinas Pendidikan	Juli - Des 2024	Des 2024	Dilakukan secara berkala
3	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	1. Undangan Sosialisasi dan pendampingan 2. Monitoring Aplikasi Dapodik	Bidang GTK	Jan - Juni 2024	Juni 2024	Dilakukan secara berkala
4	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksanakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai	1. Surat Undangan 2. Nota Dinas 3. Kehadiran 4. Monev Kegiatan	Sekretaris Dinas Pendidikan	Juli - Sep 2024	Sep. 2024	Dilakukan secara berkala

<b>Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:</b>						
1	Dinas pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran	Kabid SD,SMP dan PNF	Juli - Sep 2024	Juli 2024	Dilakukan secara berkala
2	Sosialisasi dan pendampingan terhadap satuan pendidikan yang akan dinilai oleh BAN -SM	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran	Kabid SD,SMP dan PNF	Juni - Agst 2024	Juni 2024	Dilakukan secara berkala
3	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan CEK kondisi sarpras langsung ke lokasi	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran	Kabid SD,SMP dan PNF	Jan - Mar 2024	Feb 2024	Dilakukan secara berkala
4	1. Melakukan Sosialisasi 2. Pengajuan penambahan Anggaran Beasiswa	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid SD,SMP dan PNF	Agus - Okt 2024	Agust 2024	Dilakukan secara berkala
5	Melakukan perbaik data pada Dapodik dan data analisi kebutuhan oleh satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Jan - Mar 2024	Jan dan Juli 2024	Dilakukan secara berkala
6	Dinas Pendidikan Melakukan Sosialisasi dan BIMTEK cara penggerjaan Ekinerja di PMM	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Jan- Feb 2024	Jan 2024	Dilakukan secara berkala
7	Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan pada satuan pendidikan untuk Penggerjaan Dapodik	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kasubag Perencanaan	Jan dan Juli 2024	Jan dan Juli 2024	Dilakukan secara berkala
8	Melakukan BIMTEK dan Sosialisasi ke satuan Pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran	Kasubag Perencanaan	Jan dan Juli 2024	Jan dan Juli 2024	Dilakukan secara berkala

		5. daring/luring				
9	1. Melakukan BIMTEK ARKAS 2. Layanan ARKAS secara daring/Luring	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Sekrtaris Dinas Pendidikan	Jan dan Juli 2024	Jan dan Juli 2024	Dilakukan secara berkala
10	Melalui peltihan dan BIMTEK semua guru menguasai IT	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Mei - Nov 2024	Mei - Nov 2024	Dilakukan secara berkala
11	Dinas Pendidikan Melakukan koordinasi dan mefasilitasi pembentukan komunitas belajar	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Juli - Des 2024	Juli - Des 2024	Dilakukan secara berkala
12	melakukan Sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Jan - Des 2024	Jan - Des 2024	Dilakukan secara berkala
13	Menyampaikan informasi lewat surat, Website dan Medsos	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	April - Juli 2024	April - Juli 2024	Dilakukan secara berkala
14	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Juknis 5. daring/luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Mei - Juli 2024	Mei - Juli 2024	Dilakukan secara berkala
15	Melaksanakan Pekerjaan Susuai dengan Juknis yang berlaku	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Juknis	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Mei - Des 2024	Mei 2024	Dilakukan secara berkala